



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, BPJS
KETENAGAKERJAAN, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	:	2013-2014
Masa Persidangan	:	III
Jenis rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Rapat ke	:	
Sifat Rapat	:	Terbuka
Dengan	:	Kepala BKKBN
Hari/Tanggal	:	Rabu, 19 Februari 2014
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan capaian kinerja atas program/ kegiatan prioritas Tahun 2013.2. Pembahasan dan penjelasan mengenai Kebijakan Rencana Program Kerja (KRP) Prioritas dalam Rencana Strategis (Renstra) BKKBN Tahun 2014.3. Penjelasan terkait upaya penyesuaian kebijakan pembangunan dengan pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).4. Penjelasan terkait revitalitas Program KB yang telah dilakukan selama ini (sosialisasi, kemandirian KB, sistim informasi dan kapasitas sumber daya manusia pengelola program Kependudukan dan Keluarga Berencana/KKB) dan upaya peningkatannya.5. Penjelasan terkait efektifitas Program Kesehatan Remaja lewat GENRE (Generasi Berencana) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa (PIK R/M) yang telah dilakukan selama ini.
Ketua Rapat	:	Ir. Soepriyatno/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI;
Sekretaris Rapat	:	Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Set. Komisi IX DPR RI

- Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara 1, Lantai 1, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Hadir : A. orang dari 50 Anggota Komisi IX DPR RI;
B. Kepala BKKBN beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala BKKBN dibuka pukul 10.30 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI meminta kepada BKKBN untuk mengutamakan kompetensi dalam menyelesaikan permasalahan jabatan yang masih kosong baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2. Komisi IX DPR RI meminta kepada BKKBN untuk memperkuat keberadaan dan fungsi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di daerah untuk mensukseskan program-program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) serta pembangunan keluarga untuk menuju pembangunan keluarga yang berkualitas.
3. Komisi IX DPR RI meminta kepada BKKBN untuk lebih memprioritaskan penggunaan barang-barang produksi dalam negeri dalam setiap program dan kegiatannya.
4. Komisi IX DPR RI meminta BKKBN dalam setiap program dan kegiatannya memperhatikan aspek pembangunan yang berwawasan kependudukan sehingga bonus demografi bisa dijadikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas penduduk.
5. Komisi IX DPR RI meminta BKKBN agar dalam menyusun dan merencanakan program dan kegiatannya ke depan sampai pada tingkat pedesaan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rapat diakhiri pukul 12.10 WIB.

KETUA RAPAT,



Ir. SOEPRİYATNO